

KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 12 Januari 2011

Subyek : Hutan

Hal : 13

Izin di Kawasan Hutan Dievaluasi

Jakarta, Kompas - Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menyatakan, Presiden meminta pemerintah mengevaluasi seluruh perizinan dan konsesi di kawasan hutan terkait rencana moratorium hutan. Moratorium akan dilakukan pada tahun 2011 dan 2012.

Moratorium tersebut dilakukan terkait kerja sama pengurangan emisi karbon dari pembalakan dan degradasi hutan antara Indonesia dan Norwegia.

"Rancangan yang diusulkan yaitu untuk melindungi hutan alam primer. Konsesi tidak boleh ada di hutan primer. Sedang diidentifikasi ada tidak hutan primer yang dibebani izin," kata Gusti di Jakarta, Selasa (11/1).

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat memprotes sejumlah rancangan peraturan presiden tentang moratorium yang menyatakan moratorium hanya diberlakukan untuk hutan alam primer.

Perhitungan Greenpeace Asia Tenggara didasarkan data Kementerian Kehutanan pada 2006 menunjukkan, luasan hutan alam 95 juta hektar dan moratorium hutan alam primer hanya akan melindungi 45 juta hektar hutan.

Hutan alam primer adalah hutan alam yang belum pernah ditebang industri kayu. Hutan alam sekunder adalah hutan alam yang pernah dirambah hak perusahaan hutan dan melalui proses alami kembali ditumbuhi pepohonan. Hutan tanaman adalah hutan monokultur hasil penanaman oleh manusia.

Gusti menyatakan, sulit bagi pemerintah memmoratorium hutan alam sekunder. "Berbagai jenis izin telanjur keluar atas hutan alam sekunder. Jika moratorium meliputi hutan alam sekunder, pemegang izin bisa dirugikan. Itu yang dihindari pemerintah."

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi menyatakan, pengecualian moratorium atas hutan sekunder membuka peluang bagi industri kelapa sawit dan pemegang konsesi hutan tanaman industri (HTI) untuk membatasi hutan alam. "Banyak hutan sekunder Indonesia kualitasnya menyerupai hutan primer," katanya.

"Hutan bertegakan bagus, dengan kualitas sangat baik, bisa disebut Kementerian Kehutanan sebagai hutan alam sekunder, hanya karena ada masyarakat bermukim. Seharusnya moratorium didasarkan sesuatu yang terukur jelas. Misalnya, moratorium diberlakukan untuk hutan dengan potensi tegakan 150 meter kubik per hektar. Itu terukur dan jelas," kata Elfian.

Koordinator Nasional Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi, menyatakan, "Pelaku usaha HTI masih terus menebangi hutan alam sekunder. Penggunaan hutan alam untuk bahan baku HTI naik 100 persen, dari 6,13 juta meter kubik tahun 2009 menjadi 12,18 juta meter kubik pada 2010. Penggunaan bahan baku hutan tanaman untuk bahan baku HTI turun dari 18,95 juta meter kubik pada 2009 menjadi 16,86 juta meter kubik tahun 2010," kata Vanda. (ROW)